

POLICY PAPER: KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PASCA PANDEMI COVID-19

Jalil Setiawan Jamal

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Email Korespondensi : jalilsetiawan357@gmail.com

Submitted: 12-01-2026; Accepted: 02-05-2026; Published : 07-05-2026

ABSTRAK

Pemulihan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pasca pandemi COVID-19 menunjukkan kinerja yang belum optimal dan cenderung tidak merata antar sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan struktural dalam pemulihan ekonomi daerah serta merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dan adaptif terhadap keterbatasan fiskal. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis berbasis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dan jenis pengeluaran periode 2018–2024, yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya *policy gap* dalam kebijakan pemulihan ekonomi, ditandai oleh stagnasi sektor primer, belum berkembangnya sektor industri pengolahan berbasis nilai tambah, lemahnya efisiensi logistik, serta ketergantungan pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga. Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal dan rendahnya investasi turut membatasi efektivitas intervensi kebijakan konvensional. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan kebijakan prioritas yang direkomendasikan adalah hilirisasi mikro terintegrasi berbasis rumah tangga dan klaster desa, karena dinilai paling efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat keterkaitan sektor ekonomi, serta dapat diimplementasikan dengan kebutuhan fiskal yang relatif rendah namun berdampak luas dan berkelanjutan..

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi; Pandemi Covid-19; Hilirisasi Mikro Terintegrasi.

ABSTRACT

The economic recovery of the Selayar Islands Regency following the COVID-19 pandemic has shown suboptimal performance and tends to be uneven across sectors. This study aims to analyze structural issues in regional economic recovery and formulate effective and adaptive policy alternatives to address fiscal constraints. The method used is a descriptive-analytical analysis based on Gross Regional Domestic Product (GRDP) data by business sector and type of expenditure for the 2018–2024 period, combined with a policy analysis approach. The results indicate a policy gap in economic recovery policies, characterized by stagnation in the primary sector, underdevelopment of the value-added processing industry sector, weak logistics efficiency, and dependence on household consumption for growth. Furthermore, limited fiscal capacity and low investment also limit the effectiveness of conventional policy interventions. Based on these findings, the recommended priority policy is integrated micro-downstreaming based on households and village clusters, as it is considered the most effective in increasing community income, strengthening economic sector linkages, and can be implemented with relatively low fiscal requirements but with broad and sustainable impacts.

Key word: Economic Growth; Covid-19 pandemic; Integrated Micro Downstreaming.

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu satu dekade sebelum pandemi covid-19 pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar stabil berada pada angka di atas 7 persen dan pada umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari aspek lapangan usaha, secara umum struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurun waktu dimaksud ditopang oleh pertumbuhan pendapatan lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor perdagangan dan jasa pariwisata, serta industri pengolahan skala kecil dan menengah. Ketiga sektor lapangan usaha ini telah menciptakan ekosistem ekonomi yang cukup stabil dengan memanfaatkan sumber daya alam pesisir sebagai salah satu kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar.

Namun, ditengah kestabilan ekonomi sebagaimana yang dijelaskan diatas, kemudian terjadi wabah pandemi covid-19 yang merusak fondasi ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. Pandemi covid 19 kemudian mengguncang perekonomian secara simultan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran secara agregat serta mempengaruhi mobilitas barang dan manusia dari dan ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan penelitian menyatakan bahwa wilayah dengan basis ekonomi yang bergantung pada pergerakan barang dan manusia seperti pariwisata, transportasi dan perdagangan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya (Brinca et al., 2021; Fana et al., 2020). Hal ini tentu berimplikasi pada masa pemulihan yang juga membutuhkan waktu yang lebih lama bagi daerah yang bergantung pada aktivitas pergerakan manusia dan barang dibandingkan dengan daerah-daerah yang ekonominya berbasis industri manufaktur berat, jasa telekomunikasi dan kegiatan ekonomi metropolitan.

Pandemi covid-19 telah mengubah dinamika global secara drastis. Kenaikan harga logistik secara global, peta rantai pasok yang mengalami perubahan, fluktuasi harga pangan, pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung aktivitas yang semakin cepat serta bergesernya preferensi masyarakat wisatawan

terhadap destinasi wisata yang lebih aman bagi kesehatan menjadi tantangan baru bagi pelaksanaan pembangunan daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Selayar.

Oleh karena itu, fenomena yang menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar setelah pandemi covid-19 yang berbeda dan tidak kembali seperti tren pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi covid-19 bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri. Kejadian ini adalah perwujudan dari kombinasi antara beberapa faktor antara lain faktor struktural, fiskal, dan geografis yang belum terselesaikan sepenuhnya. Mengacu pada hasil penelitian bahwa pembangunan daerah kepulauan memiliki tantangan dan kesulitan yang berbeda dengan daerah non kepulauan. Daerah yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil memiliki ukuran pasar domestik yang kecil, keterbatasan peluang investasi dan keadaan geografis yang terisolasi dari akses perdagangan dapat membatasi pertumbuhan ekonomi untuk berkembang (Vítová et al., 2019).

Dalam merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengimplementasikan kebijakan pemulihan ekonomi yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD dan RPJMD. Kebijakan tersebut antara lain diarahkan pada peningkatan belanja daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui belanja bantuan sosial dan kegiatan padat karya; pemberdayaan UMKM melalui fasilitasi permodalan, pelatihan peningkatan kapasitas usaha, serta dukungan pemasaran produk lokal; serta pengembangan sektor pariwisata melalui promosi destinasi, penyelenggaraan event, dan perbaikan sarana pendukung destinasi wisata. Selain itu, penguatan sektor perdagangan juga dilakukan melalui peningkatan aktivitas pasar lokal dan distribusi barang kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam mendorong pemulihan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan belum mampu mengembalikan kinerja ekonomi ke tingkat pra-pandemi. Secara lebih mendasar, kebijakan yang ada masih cenderung berfokus

pada stimulus konsumsi jangka pendek, sehingga belum secara signifikan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas sektor unggulan daerah.

Selain itu, program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengembangan rantai nilai (*value chain*) ekonomi lokal, sehingga pelaku usaha masih bergerak dalam skala kecil dengan keterbatasan akses pasar dan nilai tambah produk. Di sisi lain, pengembangan sektor pariwisata masih bertumpu pada pendekatan konvensional berbasis daya tarik alam, tanpa diikuti dengan penguatan tata kelola destinasi, diversifikasi produk wisata, serta keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam mendorong transformasi struktural ekonomi daerah.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya faktor struktural wilayah kepulauan, seperti tingginya biaya distribusi antar pulau, keterbatasan infrastruktur logistik, serta ukuran pasar lokal yang relatif kecil. Selain itu, belum berkembangnya kebijakan yang mendorong hilirisasi sektor perikanan dan pertanian menyebabkan sebagian besar komoditas unggulan daerah masih dipasarkan dalam bentuk mentah, sehingga potensi nilai tambah ekonomi belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan kebijakan antara kebijakan pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan dengan kebutuhan transformasi struktural ekonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan berbasis lokal. Kesenjangan ini menjadi penyebab utama terbatasnya efektivitas kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pasca pandemi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakefektifan kebijakan pemulihan ekonomi daerah, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab struktural yang mendasarinya, serta merumuskan alternatif kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual bagi wilayah kepulauan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan dengan memadukan metode kualitatif dan kuantitatif berbasis data sekunder. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara komprehensif permasalahan ketidakefektifan kebijakan pemulihan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pasca pandemi Covid-19.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dan menurut pengeluaran atas dasar harga konstan tahun 2010 dalam periode 2018–2024. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar untuk mengidentifikasi arah dan fokus kebijakan pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan analisis tren pertumbuhan ekonomi untuk mengidentifikasi perubahan kinerja ekonomi sebelum pandemi, saat krisis, dan pada masa pemulihan. Analisis ini digunakan untuk menentukan sektor-sektor unggulan yang mengalami kontraksi, stagnasi, atau pertumbuhan terbatas, serta untuk mengidentifikasi komponen pengeluaran yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Decomposition Analysis* (SDA) secara konseptual untuk menguraikan kontribusi relatif masing-masing sektor lapangan usaha dan komponen pengeluaran terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami struktur ekonomi daerah dan mengidentifikasi sektor-sektor dengan potensi peningkatan nilai tambah.

Ketiga, untuk menjawab permasalahan kebijakan, penelitian ini menggunakan *problem tree analysis* guna memetakan hubungan sebab-akibat dari

permasalahan utama, yaitu belum optimalnya pemulihan ekonomi daerah. Analisis ini mengidentifikasi penyebab langsung (kebijakan yang tidak efektif), penyebab mendasar (faktor struktural ekonomi dan karakteristik wilayah kepulauan), serta dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja perekonomian daerah.

Keempat, dilakukan *policy gap analysis* dengan membandingkan antara kebijakan pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan (berdasarkan dokumen RPJMD dan RKPD) dengan kebutuhan ideal transformasi ekonomi daerah, khususnya dalam peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan.

Kelima, penelitian ini juga menggunakan *comparative policy analysis* secara konseptual, dengan mengkaji berbagai literatur terkait pengembangan ekonomi wilayah kepulauan, pemulihan ekonomi pasca krisis, serta strategi peningkatan nilai tambah ekonomi lokal, untuk merumuskan alternatif kebijakan yang relevan dan kontekstual.

Hasil dari seluruh tahapan analisis tersebut kemudian disintesis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada beberapa kriteria utama, yaitu: (1) kemampuan mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan, (2) kesesuaian dengan karakteristik wilayah kepulauan, (3) kelayakan implementasi dalam keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta (4) potensi

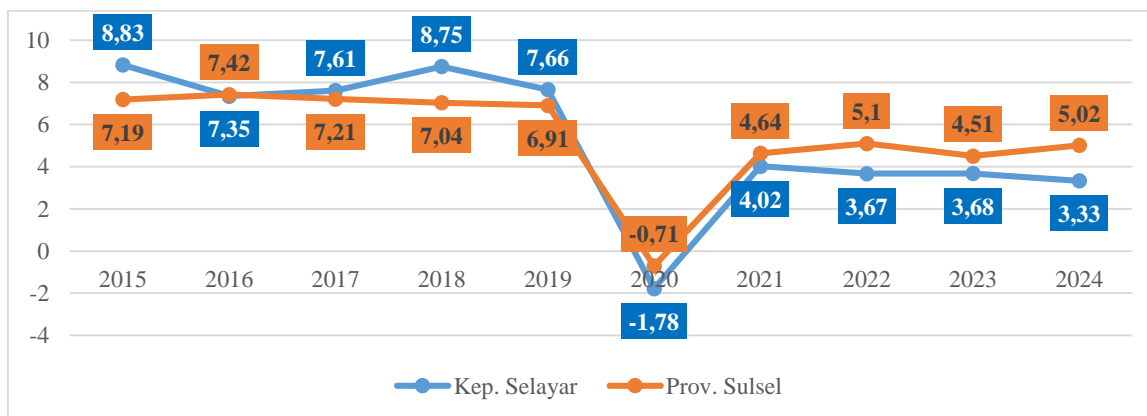
menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar 10 tahun terakhir memperlihatkan perubahan yang kompleks terutama pada saat setelah pandemi covid-19 dibandingkan dengan sebelum pandemi covid-19. Berdasarkan analisis dari data-data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta kajian dari teori-teori yang terkait, maka beberapa hal yang dapat dibahas, sebagai berikut:

1. Dinamika pertumbuhan ekonomi pra dan pasca pandemi covid-19

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan performa yang impresif yaitu berada pada angka 7 sampai 9 persen dan capaian ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi lokal mampu untuk menggerakkan sektor-sektor primer serta jasa seperti perdagangan dan pariwisata yang menjadi andalan Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kontraksi dan pada periode setelahnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar hanya berada pada angka 4 sampai 5 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Provinsi Sulsel dan BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Grafik 1 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2024

Dari grafik diatas dapat dilihat perubahan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar dari sebelum pandemi dan setelah pandemi covid-19. Pada tahun 2020, akibat pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami guncangan besar dan mengalami kontraksi tajam ke angka -1,78 persen dari yang sebelumnya sebesar 7,66 persen. Kontraksi ini selain dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas juga disebabkan karena struktur ekonomi Kepulauan Selayar yang sangat bertumpu pada sektor yang rentan terhadap pandemi seperti transportasi, perdagangan, pariwisata, industri pengolahan kecil, serta perikanan tangkap. Fenomena seperti ini disebut sebagai fenomena *hysteresis* dalam ekonomi yaitu kondisi ketika suatu daerah mengalami guncangan ekonomi akibat krisis, resesi atau pandemi dan tidak ada intervensi fiskal dan infrastruktur yang

kuat akan menyebabkan dampak yang lama dan tidak otomatis kembali ke keadaan sebelumnya (Cerra et al., 2020). Hal dimaksud terbukti pada Kabupaten Kepulauan Selayar dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sampai 2024, meskipun pertumbuhan ekonominya mengalami pemulihan namun tidak sama lagi dengan pertumbuhan ekonomi setelah pandemi covid-19.

2. Analisis pertumbuhan ekonomi secara sektoral menurut lapangan usaha

Untuk melihat kontribusi antar sektor lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dilakukan analisis terhadap capaian pertumbuhan setiap lapangan usaha pembentuk PDRB. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 – 2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Satuan	Pertumbuhan PDRB						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	7,99	7,58	-7,12	3,27	2,62	3,26	1,38
B	Pertambangan dan Penggalian	%	5,67	4,27	1,44	6,91	7,66	3,53	-0,05
C	Industri Pengolahan	%	1,91	19,09	-0,20	5,11	7,23	3,78	5,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	6,79	4,18	7,45	4,17	0,87	7,88	6,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	8,05	9,39	13,46	0,12	4,11	0,20	0,64
F	Konstruksi	%	10,37	3,84	2,01	4,12	4,56	3,45	2,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	8,89	8,94	-0,42	5,28	7,86	4,90	5,66
H	Transportasi dan Pergudangan	%	10,39	14,31	-19,00	9,98	11,67	4,84	2,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	19,22	17,90	-11,85	4,14	13,53	5,11	6,12
J	Informasi dan Komunikasi	%	9,31	13,48	11,33	1,42	1,63	6,45	4,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	6,34	6,12	4,23	0,66	0,43	2,86	2,44
L	Real Estat	%	4,2	3,84	10,32	1,25	0,73	4,88	3,73
M, N	Jasa Perusahaan	%	10,02	9,10	-10,56	0,32	2,11	2,62	6,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	15,75	6,29	3,65	4,15	-2,22	2,11	8,06
P	Jasa Pendidikan	%	4,46	7,81	7,22	4,74	5,19	4,03	5,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	9,12	10,51	12,01	9,41	8,50	5,34	9,31
R, S, T, U	Jasa lainnya	%	12,56	21,8	-4,95	5,77	3,12	5,21	11,72
	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	%	8,75	7,66	-1,78	4,02	3,67	3,68	3,33

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan tabel diatas, beberapa analisis terhadap beberapa sektor lapangan usaha sebagai berikut:

- a. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan fondasi perekonomian Selayar karena menyumbang lebih dari 40 persen dari jumlah PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun jika dilihat dari pertumbuhannya, sektor ini merupakan cerminan paling nyata dari fenomena pelemahan ekonomi secara struktural pasca pandemi. Pada tahun 2020, sektor ini mengalami kontraksi tajam sebesar -7,12 persen yang dipengaruhi oleh terganggunya distribusi logistik, pembatasan mobilitas orang dan barang serta penurunan permintaan secara agregat. Pada tahun 2021 sampai 2024 pasca pandemi, sektor ini hanya tumbuh sekitar 1-3 persen yang menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan di Kepulauan Selayar belum mampu memulihkan sektor ini karena produktivitas sektor ini masih belum optimal yang disebabkan oleh masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan. Penelitian menunjukkan bahwa sektor primer memiliki dampak yang tidak optimal bagi pemulihan pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan sektor industri atau sektor yang menghasilkan nilai tambah dari sektor primer tersebut (Hasna Tazkiya et al., 2025)
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif selama periode 2018 sampai 2024. Meskipun sempat tumbuh cukup tinggi pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan sektor ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dan bahkan mengalami kontraksi pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan sektor ini tidak berkelanjutan. Selain itu sektor ini tidak menjadi penggerak utama ekonomi daerah dan sangat tergantung pada kebijakan eksternal daerah karena sektor ini bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hirarki pembagian urusan pemerintahan.
- c. Sektor Industri Pengolahan menunjukkan pertumbuhan dengan karakter yang volatil. Pertumbuhan sektor ini mengalami kenaikan ekstrim pada tahun 2019 namun secara ekstrim juga mengalami kontraksi pada tahun 2020. Selanjutnya, setelah pandemi, pemulihan ekonomi sektor ini tidak stabil yang menunjukkan bahwa industri di Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki kedalaman industri yang lengkap dari hulu ke hilir. Meskipun demikian, pada tahun 2014 pertumbuhan sektor ini kembali mencapai 5,43 persen yang menunjukkan sektor ini memiliki potensi namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk menciptakan industrialisasi pada wilayah dengan fiskal dan infrastruktur terbatas, maka perlu untuk memfokuskan pada penciptaan industrialisasi skala usaha mikro dibandingkan dengan menciptakan industri skala besar (Weijland, 1999). Oleh karena itu, dengan adanya potensi dari sektor ini, maka sektor industri pengolahan layak dijadikan sebagai sasaran kebijakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- d. Sektor Infrastruktur dasar, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air dan pengolahan limbah menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil bahkan positif pasca pandemi covid-19. Walaupun sektor ini memiliki kinerja yang baik, namun sektor ini bukan merupakan sektor yang menjadi penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi merupakan prasyarat dasar bagi berjalannya aktivitas ekonomi. Pertumbuhan sektor ini mencerminkan bahwa terjadi ekspansi layanan publik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat, namun tidak mencerminkan terjadinya peningkatan ekonomi riil yang dapat dijadikan motor penggerak akselerasi pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut bahwa sektor ini sangat membutuhkan fiskal dan investasi yang cukup besar di tengah kebijakan efisiensi fiskal daerah serta sangat tergantung dengan kebijakan dan kewenangan dari Pemerintah Pusat terutama di sektor listrik dan gas.
- e. Sektor konstruksi menunjukkan kinerja pertumbuhan yang sangat kuat pada masa sebelum pandemi yang mencerminkan bahwa sektor ini mampu berperan untuk penggerak awal ekonomi daerah. Namun setelah pandemi, sektor ini mengalami perlambatan. Perlambatan tersebut mencerminkan melemahnya investasi daerah baik itu yang bersumber dari belanja modal pemerintah ataupun investasi swasta yang diakibatkan oleh pembatasan fiskal pasca krisis serta kebijakan efisiensi fiskal oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, konstruksi

- tidak lagi mampu dijadikan sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi.
- f. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat dibandingkan dengan sektor lain yang dipengaruhi oleh mobilitas. Sektor ini sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 namun pasca pandemi sektor ini tumbuh sekitar 4-7 % yang mencerminkan peran perdagangan dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga. Daerah atau wilayah yang kondisi investasi yang masih lambat pulih akibat pandemi, maka pemulihan ekonomi pasca pandemi sangat ditopang oleh perdagangan yang berorientasi pada konsumsi lokal (OECD, 2021). Namun, tanpa peningkatan pendapatan dan diversifikasi produk lokal, sektor ini akan rentan mengalami pertumbuhan yang dangkal.
- g. Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan salah satu sektor yang mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang tinggi sebelum pandemi, kemudian mengalami kontraksi tajam ke angka -19% pada tahun 2020, namun pemulihan pertumbuhannya setelah pandemi covid-19 belum kembali ke level sebelum pandemi. Mengacu pada hasil penelitian bahwa mobilitas dan volume manusia serta logistik sangat mempengaruhi dinamika transportasi di wilayah kepulauan (Yoselyn Nashwa et al., 2024). Pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan sebelum pandemi covid-19 disebabkan oleh intensitas mobilitas dan arus logistik. Namun seiring dengan volume muatan yang belum pulih serta mahalnya biaya logistik yang terjadi pasca pandemi, sektor ini tidak pulih secara menyeluruh.
- h. Serupa dengan Sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga terdampak pandemi yang sangat tajam. Sektor ini juga mengalami pertumbuhan yang tinggi sebelum pandemi, kemudian mengalami kontraksi tajam ke angka -11% pada tahun 2020, namun pemulihan pertumbuhannya setelah pandemi covid-19 belum kembali ke level sebelum pandemi. Pemulihan sektor pariwisata akibat pandemi covid-19 akan berjalan lambat dan sulit kembali pada saat sebelum pandemi covid-19 yang diakibatkan oleh pembatasan perjalanan dan perubahan perilaku konsumen sehingga perlu untuk menyesuaikan strategi yang berhubungan dengan konteks lokal seperti pergeseran fokus ke pasar domestik serta inovasi produk pariwisata (Shahedul Alam, 2023).
- i. Sektor Informasi dan Komunikasi menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang melambat pasca pandemi jika dibandingkan dengan kinerja sektor ini sebelum pandemi covid-19. Sektor informasi dan komunikasi khususnya teknologi digital memiliki tidak berkontribusi langsung pada PDRB, namun memiliki nilai ekonomi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan akses pasar sektor lainnya (Goldfarb & Tucker, 2019). Oleh karena itu, walaupun laju pertumbuhan pada sektor ini mengalami perlambatan, namun peran strategisnya sebagai pengungkit produktivitas sektor lainnya tidak bisa dihilangkan.
- j. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan menunjukkan kinerja pertumbuhan yang relatif stabil pada beberapa tahun pasca pandemi covid-19. Pertumbuhan sektor ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan fungsi pelayanan publik, namun tidak menunjukkan peningkatan ekonomi pasar, sehingga tidak bisa dijadikan motor penggerak utama pemulihan ekonomi daerah.
- k. Sektor Jasa Perusahaan dan Real Estate menunjukkan kinerja pertumbuhan yang memiliki pemulihan cukup stabil pasca pandemi, namun pertumbuhan dimaksud masih tergolong pertumbuhan dangkal karena permintaan untuk sektor ini masih terbatas khususnya di Kepulauan Selayar. Sektor ini hanya bisa tumbuh kuat jika ekonomi daerah tertentu sudah padat serta memiliki konsentrasi Perusahaan, tenaga kerja dan transaksi ekonomi yang tinggi. Namun, di Kepulauan Selayar yang bercirikan kepulauan dan ekonominya masih skala kecil, sektor ini belum bisa dijadikan basis pemulihan ekonomi.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Jenis Pengeluaran

Analisis PDRB dengan pendekatan pengeluaran dilakukan untuk mengetahui

Policy Paper: Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Pasca Pandemi COVID-19 (Jalil Setiawan Jamal)

bagaimana sumber-sumber permintaan secara agregat yang dapat mendorong pergerakan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan jenis pengeluaran selama kurun waktu tahun 2018 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 – 2024

Jenis Pengeluaran	Pertumbuhan PDRB						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,23	7,33	-1,92	2,41	5,09	5,10	5,24
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,32	34,65	-0,63	5,44	7,18	9,6	9,63
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,34	8,70	-6,95	7,63	-3,38	0,24	-0,62
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,18	2,83	1,82	3,9	4,66	3,43	3,48
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	8,75	7,68	-1,78	4,02	3,67	3,68	3,33

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan tabel diatas, beberapa analisis terhadap beberapa jenis pengeluaran sebagai berikut:

a. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan jenis pengeluaran yang memiliki pertumbuhan paling stabil dibandingkan dengan komponen pengeluaran yang lain. Walaupun, komponen ini mengalami kontraksi pada tahun 2020, namun konsumsi rumah tangga kembali pulih setelah pandemi covid-19 dan berada pada angka 5,24% pada tahun 2024. Hal ini menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan motor penggerak pemulihan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pasca pandemi covid-19. Menurut sukirno, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki fungsi sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi serta merupakan komponen terbesar pada permintaan secara agregat (Wijayati et al., 2025). Penelitian lain mengungkapkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga memegang peranan penting dalam merespon krisis karena pengeluaran konsumsi rumah tangga berfungsi sebagai peredam guncangan saat krisis seperti pandemi covid-19 disaat sektor-sektor lain dihantam oleh krisis (Horwitz, 2024). Namun, pengeluaran konsumsi rumah tangga akan mengalami stagnasi jika tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan (Carroll et al., 2017).

b. Konsumsi LNPRT

Pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik

setelah pandemi covid-19, walaupun belum kembali seperti periode sebelum pandemi. Setelah mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020, konsumsi LNPRT terus tumbuh setelah periode krisis dan mencapai 9,63% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa peran organisasi sosial, keagamaan serta komunitas masyarakat semakin meningkat dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa lembaga sektor sosial atau non-profit memainkan peran sebagai penyangga sosial terhadap guncangan ekonomi termasuk krisis pasca pandemi, terutama di daerah dengan kapasitas pelayanan publik yang terbatas (Salamon & Sokolowski, 2016). Organisasi masyarakat sipil juga mampu memainkan peranan yang penting dalam penanganan krisis pada masa pemulihan awal pasca pandemi karena organisasi masyarakat sipil mampu bergerak lebih cepat dibanding lembaga formal pemerintah karena didukung oleh jaringan sosial lokal yang kuat serta kepercayaan masyarakat yang tinggi (Noinam et al., 2024) Meskipun kontribusi dan peran konsumsi LNPRT terhadap pemulihan pasca pandemi sangat penting, namun konsumsi LNPRT terhadap pertumbuhan PDRB masih terbatas dan bersifat tidak langsung. Hal ini disebabkan karena sebagian besar organisasi masyarakat sipil atau nirlaba ini bergerak dibidang layanan non market atau layanan sosial dan tidak bergerak pada sektor komersial yang outputnya adalah barang dan

jasa yang diproduksi dan diperdagangkan (OECD, 2003). Oleh karena itu, pertumbuhan LNPRT harus dilihat sebagai faktor peningkatan ketahanan sosial, bukan sebagai motor penggerak peningkatan ekonomi.

c. Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan komponen pengeluaran yang memiliki volatilitas tinggi dan komponen paling rendah pertumbuhannya dibandingkan komponen lainnya. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi pada tahun 2020, namun sempat pulih pada tahun 2021, tetapi kembali melemah setelah pandemi covid-19 bahkan mengalami kontraksi pada tahun 2022 dan tahun 2024. Hal ini mencerminkan terjadinya efisiensi belanja pemerintah daerah ataupun belum optimalnya penyerapan realisasi belanja daerah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah tidak menghasilkan faktor pengganda yang kuat terhadap pemulihan pertumbuhan ekonomi pasca guncangan ekonomi yang besar seperti pandemi covid 19 dibandingkan dengan belanja investasi dan sektor produktif (Haug et al., 2023). Selain itu, kebijakan pemerintah yang termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi alasan jika pengeluaran konsumsi pemerintah tidak bisa diandalkan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2018, pertumbuhan PMTB memiliki pertumbuhan yang tinggi lebih dari 9 persen, namun terus menurun sampai titik terendah pada saat pandemi sebesar 1,82 persen. Pasca pandemi, hingga tahun 2024, pertumbuhan PMTB masih berada di kisaran 3-4%. Kondisi ini mencerminkan kurang optimalnya investasi publik maupun swasta di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada wilayah kepulauan kecil, investasi swasta dan diversifikasi ekonomi belum optimal karena terhambat oleh beberapa

faktor yaitu biaya transportasi dan logistik yang tinggi, pasar domestik yang terbatas serta tingginya risiko dalam berusaha (UNCTAD, 2020). Begitupun yang terjadi pada Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki investasi yang belum optimal dan belum mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan jika strategi pembangunan ekonomi tidak dapat bergantung pada investasi skala besar, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas skala mikro.

4. Evaluasi Kinerja Pemulihan Ekonomi dan Indikasi *Policy Gap*

Pemulihan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pasca pandemi COVID-19 menunjukkan pola yang cenderung tidak merata dan belum kembali pada pertumbuhan sebelum pandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemulihan yang terjadi bersifat parsial dan belum didukung oleh penguatan struktur ekonomi yang memadai.

Dalam konteks kebijakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi melalui instrumen fiskal daerah dan program sektoral. Intervensi tersebut antara lain diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui belanja daerah, mendukung keberlangsungan usaha mikro dan kecil, serta mendorong pemulihan sektor pariwisata dan perdagangan. Namun demikian, capaian kinerja ekonomi yang belum optimal menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang dicapai.

Kesenjangan tersebut mengindikasikan adanya *policy gap*, yaitu kondisi di mana kebijakan yang diimplementasikan belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan struktural ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari belum pulihnya sektor-sektor basis, terbatasnya pertumbuhan sektor bernilai tambah, serta masih dominannya peran konsumsi dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada keterbatasan efektivitas dan ketepatan desain kebijakan pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik ekonomi kepulauan.

5. Analisis Struktural Sektoral: Indikasi Ketidakefektifan Kebijakan

Analisis terhadap struktur sektoral menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar berlangsung secara tidak seimbang antar sektor, khususnya pada sektor-sektor yang selama ini menjadi basis perekonomian daerah. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki kontribusi dominan terhadap PDRB justru mengalami perlambatan pertumbuhan pasca pandemi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan yang dilaksanakan belum mampu mendorong peningkatan produktivitas maupun transformasi struktural pada sektor primer. Intervensi yang ada cenderung masih berorientasi pada peningkatan produksi, tanpa diiringi dengan penguatan pada aspek hilirisasi dan penciptaan nilai tambah. Akibatnya, sektor ini tetap berada dalam kondisi produktivitas rendah dan belum mampu memberikan dampak pengganda yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan menunjukkan indikasi pemulihan dengan tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi, meskipun masih bersifat fluktuatif dan belum stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi pengembangan nilai tambah di daerah, namun belum didukung oleh kebijakan industrialisasi yang terarah dan terintegrasi dengan sektor basis. Ketiadaan keterkaitan antara sektor primer dan industri pengolahan menyebabkan potensi tersebut belum berkembang secara optimal dalam mendorong transformasi ekonomi.

Selanjutnya, sektor transportasi dan logistik juga menunjukkan pemulihan yang terbatas. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh penurunan mobilitas akibat pandemi, tetapi juga oleh permasalahan struktural berupa tingginya biaya logistik dan belum efisiennya sistem distribusi antar pulau. Pendekatan kebijakan yang masih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik tanpa diiringi dengan penguatan sistem logistik dan konsolidasi pelaku usaha menyebabkan efisiensi distribusi belum tercapai.

Pada sektor pariwisata, pemulihan yang terjadi juga relatif lambat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata yang masih berorientasi pada peningkatan kunjungan belum mampu menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Minimnya integrasi

antara sektor pariwisata dengan UMKM lokal serta rendahnya pengembangan produk wisata berbasis pengalaman dan nilai tambah menyebabkan kontribusi sektor ini terhadap pemulihan ekonomi menjadi terbatas.

Secara keseluruhan, analisis sektoral ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan kebijakan pemulihan ekonomi terutama disebabkan oleh belum adanya pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah lintas sektor.

6. Analisis Berdasarkan Sisi Pengeluaran: Keterbatasan Instrumen Kebijakan

Dari sisi pengeluaran, struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama ekonomi. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh relatif stabil dan menjadi penopang utama pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Namun demikian, peran komponen pengeluaran lainnya masih terbatas. Konsumsi pemerintah mengalami tekanan sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas fiskal daerah serta kebijakan efisiensi anggaran. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi menunjukkan pertumbuhan yang relatif stagnan dan belum mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi masih sangat bergantung pada instrumen fiskal dan stimulus konsumsi jangka pendek. Ketergantungan tersebut tidak hanya membatasi ruang gerak kebijakan, tetapi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat konsumtif dan kurang berkelanjutan. Selain itu, rendahnya investasi mencerminkan belum optimalnya daya tarik ekonomi daerah, baik dari sisi infrastruktur, kepastian usaha, maupun integrasi pasar.

Dengan demikian, keterbatasan instrumen kebijakan dalam mendorong investasi dan produktivitas menjadi salah satu faktor utama yang menghambat percepatan pemulihan ekonomi daerah.

7. Sintesis Permasalahan Kebijakan: Analisis Problem Tree

Berdasarkan hasil analisis sektoral dan pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa stagnasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan

Selayar bukan semata-mata disebabkan oleh dampak pandemi, tetapi lebih pada ketidakefektifan kebijakan pemulihan ekonomi dalam mengatasi permasalahan struktural yang ada.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya desain kebijakan yang mampu mendorong transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain orientasi kebijakan yang masih berfokus pada konsumsi, belum berkembangnya kebijakan hilirisasi sektor primer, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta belum terintegrasinya rantai nilai ekonomi lokal.

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya produktivitas sektor unggulan, terbatasnya penciptaan nilai tambah, serta tidak optimalnya efek pengganda ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi daerah cenderung stagnan dan belum mampu kembali pada tingkat pertumbuhan sebelum pandemi.

Dengan menggunakan pendekatan problem tree, hubungan antara permasalahan, penyebab, dan dampak tersebut menunjukkan bahwa akar permasalahan terletak pada belum adanya kebijakan yang secara sistematis menghubungkan sektor produksi, pengolahan, dan distribusi dalam satu rantai nilai yang terintegrasi.

8. Alternatif Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis pada sub bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama pemulihan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya bersumber dari dampak pandemi, tetapi juga dari belum optimalnya desain kebijakan yang mampu menjawab permasalahan struktural ekonomi daerah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi yang terjadi masih bersifat parsial, ditandai dengan dominannya peran konsumsi rumah tangga, stagnannya investasi, serta belum berkembangnya sektor-sektor berbasis nilai tambah. Oleh karena itu, alternatif kebijakan yang dirumuskan harus secara langsung menjawab akar permasalahan tersebut, yaitu dengan mendorong peningkatan produktivitas, memperkuat keterkaitan antar sektor, serta menciptakan nilai tambah ekonomi

lokal dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan kebijakan konvensional yang bertumpu pada peningkatan belanja pemerintah dan stimulus fiskal berskala besar menjadi kurang relevan. Sebaliknya, diperlukan kebijakan yang bersifat adaptif, efisien, dan memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian masyarakat.

Alternatif kebijakan pertama adalah peningkatan nilai tambah industri rumah tangga. Kebijakan ini dirumuskan dengan menempatkan rumah tangga produktif sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen PDRB jenis pengeluaran yang memiliki pertumbuhan paling stabil, maka kebijakan memperkuat pendapatan rumah tangga merupakan kebijakan yang paling efektif dan efisien. Kebijakan ini dilaksanakan melalui hilirisasi skala mikro dengan memanfaatkan teknologi sederhana, diversifikasi produk olahan berbasis sektor unggulan perikanan dan pertanian serta pemasaran kolektif berbasis digital. Secara mekanisme, implementasi kebijakan ini diawali dengan pemetaan rumah tangga produktif dan komoditas unggulan di tingkat desa, dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan pengolahan, standarisasi produk, dan pengemasan, serta fasilitasi akses terhadap alat produksi sederhana. Selanjutnya, pemerintah daerah berperan dalam mendorong pemasaran kolektif melalui platform digital dan kemitraan usaha untuk memperluas akses pasar.

Untuk mengatasi stagnasi pada sektor primer yaitu sektor perikanan dan pertanian, maka dirumuskanlah alternatif kebijakan kedua yaitu pembentukan klaster pengolahan mikro secara terintegrasi. Klaster ini dibentuk di desa-desa nelayan dan sentra pertanian yang berfungsi sebagai simpul produksi yang sederhana untuk pengolahan hasil-hasil perikanan dan pertanian dengan menggunakan teknologi sederhana dan murah tanpa membangun pabrik berskala besar. Mekanisme pembentukan klaster dilakukan melalui penetapan lokasi berbasis sentra produksi, pengorganisasian pelaku usaha mikro dalam satu unit klaster, serta penyediaan fasilitas produksi bersama yang dikelola secara kolektif. Selain itu, dilakukan penguatan kelembagaan

melalui BUMDes atau koperasi untuk mengatur proses produksi, distribusi, dan pemasaran, serta integrasi dengan sistem logistik dan rantai pasok lokal. Pendekatan klaster dimaksud akan menyebabkan 10 sampai 20 pelaku usaha mikro dapat bekerja dalam satu unit sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan menekan biaya produksi, serta menciptakan rantai pasok yang lebih stabil yang pada ujungnya akan menyebabkan peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan.

Selanjutnya, pada sektor informasi dan komunikasi tetap memiliki ketahanan yang relatif kuat karena tidak mengalami kontraksi pada saat terjadinya pandemi, walaupun pertumbuhannya cenderung menurun pasca pandemi covid 19 jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Pada struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar, sektor dimaksud tidak menjadi sektor utama pendorong pertumbuhan perekonomian melainkan dijadikan sebagai sektor pendorong yang berperan untuk memperkuat produktivitas sektor lainnya. Penguatan sektor ini dilaksanakan melalui penerapan transformasi digital berupa pemasaran produk UMKM dan komoditas desa serta digitalisasi layanan wisata dan logistik skala rumah tangga sehingga dapat menyediakan peluang besar bagi UMKM skala rumah tangga untuk meminimalisir biaya pemasaran sekaligus memperluas akses pemasaran tanpa memerlukan pembangunan infrastruktur pemasaran konvensional yang membutuhkan biaya besar.

Pada sektor pariwisata, jenis lapangan usaha sektor akomodasi dan makan minum mengalami pemulihan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum bisa untuk dijadikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi utama terutama dalam jangka pendek. Oleh karena itu, perlu untuk merumuskan dan mengubah orientasi kebijakan pengembangan pariwisata dimaksud. Kebijakan yang dilakukan selama ini yang berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan luar daerah sangat membutuhkan biaya promosi pariwisata yang cukup tinggi serta infrastruktur besar. Selain itu, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang terbatas dan karakteristik wilayah kepulauan maka dirumuskanlah kebijakan yang lebih rasional yaitu menjadikan pariwisata sebagai penguat belanja ekonomi lokal dengan mengembangkan pariwisata berbasis komunitas sehingga bisa meningkatkan pendapatan bagi

rumah tangga dan UMKM. Pendekatan ini akan mendatangkan pengaruh pariwisata bagi peningkatan konsumsi rumah tangga dan jasa lokal tanpa investasi yang besar sebelum memperluas orientasi ke pasar wisatawan luar daerah.

Lebih lanjut, pada sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan yang melambat jika dibandingkan antara sebelum dan sesudah pandemi. Hal ini tentunya membutuhkan kebijakan konektivitas yang kreatif dan inovatif. Sementara itu, kebijakan efisiensi fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah menyebabkan kapasitas fiskal daerah semakin terbatas. Mempertimbangkan hal tersebut maka pembangunan infrastruktur besar tidak akan lagi menjadi solusi untuk menggerakkan sektor ini sehingga dibutuhkan intervensi kebijakan yang paling efektif dan efisien melalui peningkatan efisiensi logistik.

Pertumbuhan ekonomi sektor transportasi dan pergudangan sebelum pandemi sangat tinggi mencapai angka 14 persen. Hal ini disebabkan karena masih tingginya mobilitas orang dan barang serta lancarnya distribusi komoditas primer antar pulau ataupun dari dan menuju Kepulauan Selayar. Namun setelah pandemi melanda, walaupun jadwal pelayaran sudah relatif pulih dan terjadwal namun pertumbuhan PDRB sektor ini belum kembali optimal karena volume muatan yang menurun serta masih lemahnya pengintegrasian rantai pasok lokal. Oleh karena itu kebijakan yang dirumuskan diarahkan pada peningkatan efisiensi dan kepastian arus barang melalui konsolidasi muatan, penataan simpul logistik dan pembentukan kemitraan antara BUMDes dengan operator atau pemilik angkutan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan layanan transportasi yang lebih optimal, menurunkan biaya logistik pelaku usaha serta meningkatkan pendapatan sektor transportasi dan pergudangan secara lebih stabil dan berkelanjutan.

Perumusan alternatif kebijakan dalam *policy paper* ini tidak mencakup seluruh sektor lapangan usaha pembentuk PDRB karena pemilihan didasarkan pada data pertumbuhan, kapasitas fiskal dan efektivitas intervensi Pemerintah Daerah. Pemilihan sektor lapangan usaha untuk perumusan alternatif kebijakan dilakukan dengan melihat sektor lapangan usaha yang masih atau telah memiliki momentum pertumbuhan, memiliki hubungan langsung

dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang merupakan sektor pengeluaran yang memiliki pertumbuhan yang relatif stabil, mampu menyerap tenaga kerja lokal serta dapat diintervensi secara realistis oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar baik dari segi kewenangan maupun dari ketersediaan fiskal. Di sisi lain, sektor-sektor lain yang tidak dipilih sebagai fokus utama perumusan kebijakan karena beberapa sektor dimaksud mempunyai karakteristik yang dipengaruhi oleh kebijakan pusat, membutuhkan anggaran dan investasi yang cukup besar, sangat bergantung pada pengeluaran konsumsi pemerintah, serta memiliki dampak penggerak ekonomi lokal yang relatif rendah.

9. Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan pemulihan ekonomi yang bersifat konvensional tidak lagi memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah kepulauan dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas fiskal. Kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan belanja daerah, pemberian bantuan kepada pelaku usaha, serta promosi sektor pariwisata tanpa diiringi dengan transformasi struktural cenderung menghasilkan dampak yang terbatas dan bersifat jangka pendek.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan kebijakan yang lebih menekankan pada peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah lokal. Pendekatan ini harus mampu mengintegrasikan sektor-sektor unggulan dalam suatu sistem ekonomi yang saling terhubung, sehingga dapat menghasilkan efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, arah kebijakan yang diperlukan adalah pengembangan model hilirisasi berbasis skala mikro yang terintegrasi dengan potensi lokal dan berbasis rumah tangga dan klaster desa. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan, memiliki kebutuhan pembiayaan yang relatif rendah, serta mampu mendorong peningkatan nilai tambah secara langsung di tingkat masyarakat.

Kebijakan hilirisasi mikro terintegrasi diharapkan menjadi solusi jangka pendek dan kebijakan struktural untuk menghadapi stagnasi

sektor primer yaitu pertanian dan perikanan yang selama empat tahun terakhir hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 1 sampai 3 persen sehingga dapat memperbaiki fondasi perekonomian daerah. Kebijakan ini tentu akan mengarahkan rantai nilai pasok dari pedagang besar ke pelaku usaha skala rumah tangga yang menyebabkan berkurangnya ketergantungan pada pasar bahan mentah dan meningkatkan daya tawar produsen lokal. Hal ini seiring dengan kembali menguatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan pada tahun 2024, sehingga diharapkan kebijakan ini dapat mengintervensi percepatan momentum positif dimaksud.

Salah satu elemen utama dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah hilirisasi mikro terintegrasi dengan klaster ekonomi berbasis desa. Klaster ekonomi berbasis desa berfungsi untuk menciptakan pusat-pusat produksi kecil baru yang memiliki standar pengolahan yang seragam, akses pasar yang terorganisasi serta koordinasi ketersediaan pasokan yang lebih rapi. Dengan adanya klaster, bantuan pemerintah tidak lagi disalurkan secara parsial kepada individu-individu di desa, tapi terintegrasi kepada kelompok ekonomi yang lebih produktif. Kebijakan berbasis klaster ini juga akan menjamin keberlanjutan UMKM karena tidak lagi berjalan parsial tetapi dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Selain meningkatkan produksi dan nilai tambah, kebijakan ini juga meningkatkan integrasi antara hilirisasi skala mikro dengan sektor pariwisata. Pendekatan pengembangan pariwisata yang menjadikan belanja wisatawan sebagai instrumen utama penggerak ekonomi lokal bukan hanya berfokus pada jumlah kunjungan semata, maka produk-produk olahan yang dihasilkan dari UMKM klaster desa akan menjadi bagian integral dari peningkatan daya tarik wisata sehingga dapat menciptakan siklus belanja yang memperkuat pengeluaran konsumsi rumah tangga. Lebih lanjut bahwa digitalisasi rantai pasok menjadi faktor pendukung yang sangat penting untuk memperkuat kekuatan pasar dari produk-produk hasil olahan skala rumah tangga dan desa serta promosi wisata. Memperhatikan segala penjelasan diatas, rekomendasi kebijakan hilirisasi mikro terintegrasi berbasis rumah tangga dan klaster desa, didukung oleh integrasi belanja wisata,

digitalisasi rantai pasok serta efisiensi logistik menjadi rekomendasi kebijakan yang paling efektif, efisien, berdampak dan sesuai dengan struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar.

SIMPULAN

Pemulihan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pasca pandemi COVID-19 belum berlangsung optimal dan cenderung tidak merata, ditandai oleh dominasi konsumsi rumah tangga, stagnasi investasi, serta belum pulihnya sektor-sektor basis seperti pertanian dan perikanan. Hasil analisis menunjukkan adanya *policy gap* di mana kebijakan pemulihan belum efektif menjawab permasalahan struktural, khususnya rendahnya nilai tambah, lemahnya keterkaitan antar sektor, serta tingginya biaya logistik. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran pendekatan kebijakan dari berbasis konsumsi menuju penguatan produktivitas dan nilai tambah lokal. Dari berbagai alternatif kebijakan yang dianalisis, kebijakan yang paling efektif dan prioritas untuk diterapkan adalah hilirisasi mikro terintegrasi berbasis rumah tangga dan klaster desa, karena mampu secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat keterkaitan sektor primer dan industri pengolahan, serta dapat diimplementasikan dengan kebutuhan fiskal yang relatif rendah namun berdampak luas dan berkelanjutan terhadap perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. S. (2023). Tourism Recovery Strategies on Post Covid-19 Pandemic: A Review. *International Journal of Tourism and Hospitality*, 3(2), 1-8. doi:doi: 10.51483/IJTH.3.2.2023.1-8
- Brinca, P., Duarte, J. B., & Faria-e-Castro, M. (2021). Measuring labor supply and demand shocks during COVID-19. *European Economic Review*, 139, 1-20. doi:https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2021.103901
- Carroll, C., Slacalek, J., Tokuoka, K., & White, M. (2017). The distribution of wealth and the marginal propensity to consume. *Quantitative Economics*, 8(3), 977–1020. doi:https://doi.org/10.3982/QE694
- Cerra, V., Fatás, A., & Saxena, S. (2023). Hysteresis and Business Cycles. *Journal of Economic Literature*, 61(1), 181–225. doi:doi: 10.1257/jel.20211584
- Fana, M., Pérez, S. T., & Fernández-Macías, E. (2020). Employment impact of Covid-19 crisis: from short term effects to long terms prospects. *Journal of Industrial and Business Economics*, 47, 391–410. doi:https://doi.org/10.1007/s40812-020-00168-5
- Goldfarb, A., & Tucker, C. (2019). Digital Economics. *Journal of Economic Literature*, 57(1), 3-43. doi:doi.org/10.1257/jel.20171452
- Gössling, S., & Schweiggart, N. (2022). Two years of COVID-19 and tourism: what we learned, and what we should have learned. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(4), 915-931. doi:https://doi.org/10.1080/09669582.2022.2029872
- Haug, A., & Sznajderska, A. (2023). Government spending multipliers: Is there a difference between government consumption and investment purchases? *Journal of Macroeconomics*, 79. doi:doi.org/10.1016/j.jmacro.2023.103584
- Horwitz, S. (2024). Households as Crisis Shock Absorbers. *Markets & Society*, 1(1), 66-86.
- Ioannides, D., & Gyimóthy, S. (2020). The COVID-19 crisis as an opportunity for escaping the unsustainable global tourism path. *Tourism Geographies*, 22(3), 624-632. doi:https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1763445
- Nashwa, D. Y., Nahry, Soedhono, S., & Burhan, H. (2024). Pemodelan Freight Trip Generation Berbasis Zona dengan Modal Kapal. *Jurnal Transportasi*, 24(3), 241-250. doi:https://doi.org/10.26593/jtrans.v24i3.8847.241-250
- Noinam, S., Piaseu, N., Junda, T., Tantiprasoplap, S., Kraithaworn, P., Krongthao, S., . . . Srisuk, W. (2024). Civil Society Involvement in Managing the COVID-19 Pandemic: A Case Study of a Large and Congested Urban Community in Bangkok, Thailand. *Health Equity*, 8(1), 269-278. doi:DOI: 10.1089/heq.2023.0215
- OECD. (2003). *The non-profit sector in a*

- changing economy*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2021). *OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 2, No. 110*. Paris: OECD Publishing.
doi:<https://doi.org/10.1787/66c5ac2c-en>
- Salamon, L., & Sokolowski, S. W. (2016). Beyond Nonprofits: Re-conceptualizing the Third Sector. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 27(4), 1515-1545.
- Tazkiya, N. H., Baitunnisa, N. C., & Hakam, L. I. (2025). Peran Transformasi Struktur Ekonomi Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Literatur Sistematis. *Jurnal Ekonomi : Journal of Economic*, 16(2), 132-138.
doi:<https://doi.org/10.47007/jeko.v16i02.9195>
- UNCTAD. (2020). *The Least Developed Countries Report 2020: Productive Capacities for the New Decade*. Geneva: United Nations.
- Vítová, P., Harmáček, J., & Opršal, Z. (2019). Determinants of tourism flows in Small Island Developing States (SIDS). *Island Studies Journal*, 14(2), 1-20.
doi:<https://doi.org/10.24043/isj.90>
- Weijland, H. (1999). Microenterprise Clusters in Rural Indonesia: Industrial Seedbed and Policy Target. *World Development*, 27(9), 1515-1530.
doi:[https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00076-5](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00076-5)
- Wijayati, D., Sawitri, N. D., & Fajarani, A. A. (2025). Analisis Pengaruh Konsumsi, Investasi, dan Belanja Pemerintah Terhadap PDB di Indonesia: Pendekatan Data Time Series Tahun 1995-2024. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonom*, 1(4), 3486-3495.
doi:doi.org/10.63822/j14r8404